

Prospek Pengembangan Agribisnis Beras di Jawa Barat

Sebagai sentra produksi beras nasional, prospek pengembangan agribisnis beras di Jawa Barat cukup menjanjikan. Syaratnya, kendala yang sering dijumpai di masing-masing subsistem agribisnis harus segera ditangani.

Jawa Barat dikenal sebagai lumbung beras nasional, dengan total luas areal panen mencapai 2,188 juta ha atau 18,86% dari luas panen nasional. Menurut hasil survei pertanian tahun 2000, produktivitas rata-rata mencapai 4,91 t/ha atau di atas rata-rata nasional (4,4 t/ha), serta total produksi mencapai 10,750 juta ton atau 20,7% dari produksi nasional. Posisi strategis Jawa Barat sebagai penyangga pangan nasional ini perlu mendapatkan perhatian karena dari waktu ke waktu menghadapi berbagai

yang termasuk salah satu tujuan migrasi. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan lahan, baik untuk pemukiman maupun prasarana publik.

Mata rantai sistem agribisnis beras di Jawa Barat melibatkan empat subsistem, yaitu pengadaan sarana produksi dan alsintan, usaha tani padi atau produksi, pasca-panen atau penggilingan padi-beras, serta distribusi dan pemasaran. Ke-empat subsistem tersebut mempunyai kinerja dan kendala yang berbeda, serta mempunyai peluang dikembangkan



Jumlah alat perontok gabah yang terbatas mendorong petani untuk merontokkan gabah secara manual.

masalah, antara lain: (1) tingginya konversi lahan ke penggunaan non-pertanian karena kegiatan investasi di wilayah ini termasuk paling besar sehingga permintaan lahan untuk kegiatan ekonomi nonpertanian terus meningkat, dan (2) letaknya berdekatan dengan Jakarta sehingga harus menanggung luapan penduduk Jakarta dan sekitarnya

untuk memberikan nilai tambah bagi pelaku ekonomi yang tercakup di dalamnya.

Kinerja dan Kendala Pengembangan Agribisnis Beras

Subsistem Saprodi

Pencabutan subsidi pupuk (Desember

1998) dan monopoli distribusi pupuk oleh PT PUSRI secara umum telah meningkatkan jumlah pedagang saprodi, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun tingkat desa. Jumlah kios saprodi di desa cukup banyak (5 unit kios per desa) dengan harga yang bersaing. Namun demikian, kelangkaan pupuk pada musim tanam kadang masih terjadi meskipun dalam waktu yang relatif singkat (10 hari).

Infrastruktur irigasi relatif cukup baik, meskipun saluran tersier kurang terpelihara dan saluran cacing banyak yang hilang. Kelangkaan petani baik kelompok tani maupun P3A Mitracai makin lemah karena pembinaan dan konsolidasi anggota lemah. Akibatnya jarang ditemukan kelompok tani yang mampu melayani kebutuhan saprodi serta alsintan bagi anggotanya. Kelembagaan KUD banyak yang mengalami kebangkrutan sejak subsidi pupuk dihapus dan distribusi pupuk diserahkan ke mekanisme pasar bebas, kecuali kelembagaan KUD yang sebelumnya telah melakukan diversifikasi usaha. Tenaga kerja di sentra produksi padi juga kian langka akibat migrasi ke kota (Jabotabek), sementara lahan sawah terus berkurang karena konversi lahan ke penggunaan nonpertanian.

Subsistem Produksi

Produktivitas padi di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional (4,91 vs 4,4 t/ha), meskipun masih lebih rendah dari potensinya (> 6 t/ha). Penyebabnya antara lain adalah: (1) belum semua petani menggunakan varietas unggul berlabel, umumnya petani melakukan penggantian benih berlabel kalau sudah ditanam 2-3 kali; (2) teknologi budi daya yang tersedia belum spesifik lokasi sesuai kondisi agroekosistem, khususnya pemilihan varietas dan pemupukan berimbang. Takaran pupuk SP-36 masih di bawah takaran anjuran dan sebagian besar petani tidak menggunakan pupuk KCl; (3) kemampuan petani dalam mengidentifikasi dan mengendalikan hama dan penyakit utama pada padi

masih rendah; dan (4) penggunaan air irigasi terlalu boros, padahal pemberian air irigasi secara berselang dapat memberikan hasil sama dengan pengairan secara terus menerus.

Beberapa langkah operasional untuk menghadapi kendala dan dalam rangka mempertahankan produksi padi adalah: (1) peningkatan mutu intensifikasi dengan meningkatkan penggunaan pupuk SP-36 dan KCl, (2) peningkatan intensitas pertanaman di lahan sawah, baik di lahan sawah irigasi melalui gerakan hemat air dengan teknik pemberian air berselang, maupun di lahan tadah hujan dengan pengembangan irigasi pompa; dan (3) introduksi padi hibrida yang memiliki produktivitas 15-20% lebih tinggi.

Subsistem Pascapanen

Petani umumnya memanen padi bila gabah dan daun bendera telah menguning atau berdasarkan umur tanaman. Pemanenan sebagian besar dilakukan dengan sistem kroyokan, terutama di Subang, Majalengka, dan Indramayu. Pemanen lebih menyukai cara ini karena upah panen (bawon) sebesar 6:1 lebih menguntungkan pemanen. Akibatnya petani/buruh tani lebih memilih memanen daripada mencangkul. Selain itu, di daerah pantura Jawa Barat terjadi senjang pemilikan lahan sawah. Petani yang memiliki sawah sedikit, tetapi yang sedikit itu memiliki lahan yang luas atau sebagai "tuan tanah". Sebagai ilustrasi, pada tahun 2001 Puslitbangsosek menemukan 7 orang yang menguasai lahan hingga 23 ha. Jumlah alsin pemanen dan pascapanen juga terbatas sehingga sistem panen kroyokan tetap dipilih, meskipun kehilangan hasil saat panen dan pengangkutan cukup tinggi.

Untuk menekan kehilangan hasil dan memperbaiki mutu beras dapat diterapkan beberapa cara, antara lain paket teknologi produksi beras premium yang menerapkan sistem manajemen mutu melalui proses *good agriculture practices*

(GAP), *good post-harvesting practices* (GPHP) dan *good milling practices* (GMP); atau paket teknologi produksi beras kristal yang menggunakan sistem pemolesan atau pengkabutan. Saat ini belum ada keterkaitan antara proses GAP, GPHP dan GMP. Proses GAP masih ditangani petani secara manual, GPHP ditangani kelompok pemanen gabungan cara manual dan penggunaan *power thresher*, dan proses GMP ditangani industri pengolahan swasta yang sebagian belum mampu menghasilkan beras berkualitas. Akibatnya tidak ada jaminan mutu dan harga gabah bagi petani, dan harga beras yang diterima penggiat swasta murah.

Subsistem Distribusi dan Pemasaran

Kebijakan pemerintah dalam perberasan terutama liberalisasi impor beras, serta makin rendahnya harga beras di pasar dunia dan nilai rupiah mengakibatkan beras impor membanjiri pasar dalam negeri. Pada gilirannya harga beras dan gabah dalam negeri turut tertekan. Monopoli Bulog dalam impor beras dihapuskan sehingga importir swasta dapat mengimpor beras sesuai dengan mekanisme pasar.

Sistem pemasaran beras di Jawa Barat lebih banyak menerapkan strategi pemasaran klasik, yaitu memandang pasar (konsumen) sebagai sesuatu yang homogen (serba sama). Hal ini antara lain ditunjukkan oleh pelaku agribisnis beras yang cenderung menerapkan strategi pemasaran dengan "menjual apa yang dihasilkan" dan hampir melupakan keadaan pasar yang heterogen (preferensi konsumen berbeda). Dengan berubahnya preferensi konsumen, strategi pemasaran beras harus diubah menjadi "menjual apa yang diinginkan" oleh pasar (konsumen). Untuk dapat memenuhi preferensi konsumen yang heterogen, baik antargolongan pendapatan, cita rasa suatu komunitas terhadap beras, maupun segmen pasar yang berbeda, maka salah satu strategi yang ditempuh adalah melalui pendekatan produk.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penghambat sistem agri-

bisnis beras pada aspek pemasaran adalah kualitas gabah atau beras yang rendah, harga gabah atau beras berfluktuasi, proporsi beras yang terserap oleh Dolog rendah karena tidak memenuhi standar kualitas yang ditentukan, dan adanya indikasi masuknya beras impor secara ilegal (penyelundupan).

Pada subsistem penunjang, kelembagaan petani yang sudah ada harus dibangun dalam dimensi integrasi vertikal sistem agribisnis. Kelembagaan ini diharapkan mampu memberikan layanan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pelaku usaha agribisnis seperti manajemen dan kewirausahaan, permodalan, dan teknologi melalui penciptaan mekanisme hubungan antarpelaku ekonomi agribisnis beras dengan berbagai kelembagaan penunjang lainnya. Untuk itu, diperlukan peningkatan fungsi dan peran kelembagaan penunjang seperti pendidikan dan penyuluhan, penelitian, dan perkreditan, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Implikasi Kebijakan

Pengembangan agribisnis beras harus dipandang sebagai suatu sistem yang terkait antarsubsistem yang satu dengan yang lain melalui pendekatan produk. Mengingat produk yang dihasilkan suatu subsistem akan menjadi input subsistem yang lain, maka produk harus memiliki produktivitas dan kualitas standar sesuai dengan yang dibutuhkan masing-masing subsistem. Model agribisnis beras skala kecil-menengah di Jawa Barat hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) dimulai dari unit komersial milik petani, baik dalam bentuk kelompok tani/P3A Mitra-cai, koperasi kelompok tani, koperasi agribisnis, kelembagaan KUD maupun kelompok UPJA sebagai embrio pengembangan agribisnis skala kecil menengah, (2) berorientasi pada permintaan pasar atau preferensi konsumen, (3) menerapkan sistem mutu dan melaksanakan perbaikan paket teknologi GAP, GPHP dan GMP, secara simultan; (4) mendudukkan

kembali peran Bulog/Dolog sebagai lembaga pengendali harga serta memperbaiki sistem distribusi dan pemasaran beras nasional; serta (5) memformulasikan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran beras, mengurangi distorsi pasar serta menanggulangi penyelundupan beras, dan membuka pasar beras untuk PNS dengan layanan yang lebih profesional (*Saptana*).

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian

Jln. A. Yani No. 70

Bogor 16161

Telepon : (0251) 333964

Faksimile: (0251) 314496

E-mail : caser@indosat.net.id